

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Firmansyah, Dadang, Ari Rahmasari, Lutfia Ismira Dewi, Reza Ferdiansyah, dan Vira Annizar. *Buku Profil Desa Setupatok Tahun 2021*. Setupatok: Pemerintah Desa Setupatok, 2021.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sedarmayanti. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Styawan, H. P., Budiyanto, dan Riharjo, I. B. (2024). *Skema Sertifikasi Kompetensi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Silalahi, Ulber. *Kepemimpinan Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. (Ponorogo): Uwais Inspirasi Indonesia. (2021)

Jurnal

- Abdul Jabar. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Good Governance." *Welfare State* 4, No. April (2025).
- Ahmad, Rafsanjani, dan Bambang Panji Gunawan. Pengawasan Keuangan Desa Kedungrejo Kecamatan Jabon. *Jurnal Administrasi Publik*, 2021.
- Akbar, Aghisna Derajat, dan Prayoga Bestari. "Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebon Jayanti." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 5, no. 2 (2025).
- Andrianita, Cyndi, H. T. B. Yudi, dan Muhtadi Hilman. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Jayanti Kabupaten Tangerang). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* (2024).

Bunker, Douglas R. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana."

Jurnal Administrasi Publik (2010).

Faysal, Ahmad, dan Galih Wahyu Pradana. "Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)."

PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik (2023).

Ginting, Dwitri Hariaty, Amran Manurung, dan Jadongan Sijabat. "Implementasi Pengawasan Dana Desa di Desa Bukit Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo." *Jurnal Akuntansi Nommensen* (2024).

Kartika, Rina. "Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Keuangan Desa." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia* 4, no. 1 (2024).

Kaunang, Markus Meiske Lantaka, dan Johny P. Lengkong. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Jurnal Eksekutif* (2021).

Nurlia, Elly. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)." *Jurnal Administrasi Negara* (2017).

Nugroho, Muhammad Fajar. "Koordinasi Pemerintah Desa dan BPD dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023).

Pratama, Ade Krisdian, Badaruddin, dan Abdul Kadir. "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa." *Perspektif: Jurnal*

Ilmu Administrasi (2021).

Pratama, Sinar Wahyu, Minollah, dan Sarkawi. "Peran BPD dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur)." *Jurnal Diskresi* (2022).

Rahmawati, Siti. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa." *Jurnal Governance Indonesia* 8, no. 1 (2024).

Rompas, Wilson Y., dan D. L. Tampongangoy. "Implementasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Badan Kepegawaian Daerah Kota Ternate." *Jurnal Administrasi Publik* VIII, No. 126 (2026): 30.

Saputra, Deni, Imam Sunarto, dan Asmuni. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember." *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 6, no. 2 (2024): 221.

Sipayung, Baren. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, 2018.

Solihin, Danu Firman, dan Agung Setiawan. "Rekomendasi Ombudsman dalam Peningkatan Pelayanan Publik." *Jurnal Diskresi* (2025).

Syarifuddin. "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2020).

Taftiyan, Dhiya, Titin Rohayatin, et al. "Peran Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD dalam Pengelolaan Dana Desa." *Praxis Idealis: Jurnal Ilmu*

Administrasi dan Kebijakan Publik (2024).

Wisnu Hilmantio, Minollah, A. D. Basniwati, dan Rachman Maulana Kafrawi.

“Peran BPD dalam Pengawasan Dana Desa.” *Jurnal Diskresi (2021).*

Valery, Radix Cecario, dan Danny Permana. “Implementasi Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko melalui OSS di Kota Bandung.” *Jurnal Prinsip 2*, no. 1

(2025).

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 Seri e.110, 2015.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 adalah Undang-Undang

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 adalah Undang-

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 adalah Undang-

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Entri ‘Pengawasan’,” KBBI Daring, diakses 25 Februari 2026, kbbi.kemdikbud.go.id.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pemerintahan Daerah," diakses dari kbbi.kemdikbud.go.id pada 26 Februari 2026.

“Lemahnya Otoritas BPD dalam Sistem Pemerintahan Desa: Antara Regulasi dan Realita di Lapangan.” *Pikiran-Rakyat.com*. Diakses 20 Januari 2026. <https://sumedangraya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-3319430966/lemahnya-otoritas-bpd-dalam-sistem-pemerintahan-desantara-regulasi-dan-realita-dilapangan?_gl=1%2A17tnze%2A_ga%2ASjNsb0MtRHVFRGNEM1FZanloV3Vmc3dSVWpVWZueVZtdjNxQWZ4WkVfS1lqS1FFtZl1bHNyMTJIOG1Ycl9zeA..&page=3

“Sejarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).” BPK Donoharjo. Diakses 20 Januari 2026. <https://bpkdonoharjo.com/post/sejarah-badan-permusyawaratan-desabpd-091325>

“Kegiatan Penyediaan Tunjangan dan Belanja Operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Menanga.” *menanga-karangasem.desa.id*. Diakses 20 Januari 2026. <https://www.menanga-karangasem.desa.id/artikel/2025/01/20/kegiatan-penyediaan-tunjangan-dan-belanja-operasional-bpd-badan-permusyawaratan-desadesa-menanga>

“Pengertian Pengawasan.” Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Diakses 20 Januari 2026. <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>

“Pengertian Pengawasan.” Google Share. Diakses 13 Februari 2026. <https://share.google/2g3H9HH6DsLlExwm6>

Wawancara

Wawancara dengan Johar Kepala Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Cirebon, 26 Januari 2026.

Wawancara dengan Mujaki, Tokoh Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Cirebon, 26 Januari 2026.

Wawancara dengan Nuni Nuriah, Ketua BPD Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Cirebon, 24 Januari 2026.

Skripsi

Saragih, Junedi. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pengawasan di Desa Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai. Skripsi, Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, 2023.

